

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) memegang peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali calon guru dengan kombinasi antara pengetahuan teoretis, keterampilan praktis, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menjawab tantangan kompleks pendidikan abad ke-21. Melalui penyelenggaraan Program PPG, peserta diharapkan tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai pedagogis, tetapi juga mampu menguasai materi ajar secara mendalam, serta menunjukkan kompetensi sosial dan kepribadian yang menjadi fondasi terciptanya proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan bermakna (Susilawati, 2020). Untuk memperkuat peran strategis tersebut, penyelenggaraan Program PPG dilandaskan pada regulasi formal yang menekankan profesionalisme guru sebagai titik sentral dalam pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan salah satu komponen strategis dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Program ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020, yang menegaskan pentingnya menyiapkan guru profesional dengan kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang sesuai dengan tuntutan zaman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Selain itu, kurikulum PPG disusun untuk membekali peserta tidak hanya dengan penguasaan substansi materi ajar, tetapi juga dengan keterampilan pedagogis yang relevan, seperti perencanaan pembelajaran, asesmen autentik, dan refleksi praktik mengajar.

Implementasi PPG secara luas mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam merespons disparitas kualitas guru di berbagai wilayah Indonesia. Program ini bukan sekadar inisiatif pelatihan semata, melainkan bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat fondasi sistem pendidikan

nasional melalui peningkatan kapasitas profesional guru. Sejak diperkenalkannya program ini, pemerintah secara konsisten memperluas cakupan implementasi PPG ke berbagai daerah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan tujuan utama meratakan kualitas pendidikan dan mengatasi ketimpangan kompetensi pendidik antarwilayah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi dalam program PPG berdampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri guru dalam mengelola pembelajaran, keterampilan pedagogik, serta kesadaran akan pentingnya pendekatan student-centered learning yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik (Lestari & Prasetyo, 2022; Nuraini et al., 2021). Dengan demikian, Program PPG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kapasitas individu guru, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi makro transformasi pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Kebijakan implementasi PPG ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan visi jangka panjang untuk menghasilkan pendidik profesional. Pendidikan Profesi Guru (PPG) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020, yang menegaskan pentingnya menyiapkan guru dengan empat kompetensi utama: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Tujuan utama program ini tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran secara efektif, inovatif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman (Rahmawati, 2020). Kurikulum PPG disusun untuk mengintegrasikan teori pendidikan, praktik reflektif, serta pengalaman lapangan, sehingga mampu membentuk guru yang adaptif, reflektif, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing (Yusuf et al., 2023). Oleh karena itu, sinergi antara peraturan, desain kurikulum, dan pelaksanaan PPG di lapangan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program ini dalam membentuk guru masa depan yang tangguh dan berdaya saing global.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, sejumlah tantangan dan hambatan muncul dalam proses implementasi, mulai dari perbedaan kualitas lembaga penyelenggara, kesiapan peserta, hingga keterbatasan fasilitas pendukung, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Sumiyaty, Sudrajat, & Yusuf, 2023). Variasi kapasitas antar LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), baik dari sisi sumber daya manusia, sarana digital, maupun kemitraan sekolah mitra, menjadi faktor krusial yang menentukan mutu pelaksanaan PPG. Ketimpangan ini diperparah dengan masih rendahnya literasi teknologi sebagian calon guru, terutama mereka yang berasal dari daerah dengan akses terbatas terhadap sumber belajar digital (Fadillah & Mulyana, 2021).

Selain itu, beban administratif dan tekanan penyelesaian program dalam waktu yang terbatas sering kali menyebabkan calon guru lebih fokus pada pemenuhan tugas formal daripada pengembangan kompetensi substansial. Padahal, menurut Harjanto et al. (2022), keberhasilan PPG sangat bergantung pada kualitas pengalaman reflektif peserta selama praktik mengajar, bukan sekadar pencapaian akademik atau kelulusan sertifikasi. Di sisi lain, kendala pembiayaan dan dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah juga menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi, terutama dalam konteks pembiayaan mandiri bagi peserta PPG Prajabatan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan kebijakan diferensiatif yang mempertimbangkan konteks lokal dalam pelaksanaan PPG agar tujuannya tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga berdampak substantif terhadap mutu pendidikan nasional.

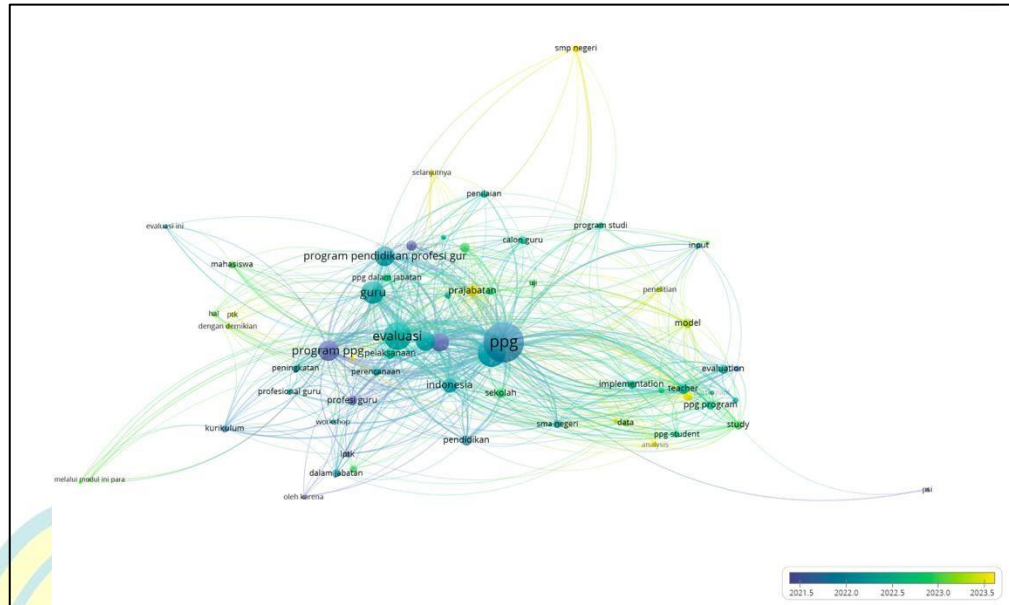
Namun demikian, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, antusiasme terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap menunjukkan tren yang positif. Data mengenai jumlah mahasiswa PPG Calon Guru pada Gelombang 1 dan 2 semester pertama tahun 2023 memberikan gambaran yang kuat tentang cakupan dan tingkat penerimaan program ini di kalangan lembaga pendidikan dan calon guru di Indonesia. Pada Gelombang 1, tercatat partisipasi sebanyak 82 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan total 18.493 mahasiswa, sedangkan pada

Gelombang 2 melibatkan 75 LPTK dengan jumlah mahasiswa sebanyak 12.633 orang (Direktorat Pendidikan Profesi Guru, 2023). Partisipasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa PPG Calon Guru telah mendapatkan dukungan luas dari institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hal ini mencerminkan adanya dorongan yang kuat terhadap upaya profesionalisasi guru melalui jalur pendidikan formal yang terstruktur dan sistematis. Tingginya partisipasi tersebut juga merepresentasikan kesadaran kolektif bahwa sertifikasi guru merupakan instrumen penting dalam peningkatan mutu dan legitimasi profesi keguruan (Suwandi, 2020; Nugroho & Setiyani, 2021). Sebagai salah satu kebijakan strategis dalam transformasi pendidikan nasional, PPG dinilai mampu menjawab kebutuhan akan pendidik yang tidak hanya kompeten dalam aspek akademik, tetapi juga berintegritas tinggi serta memiliki kapasitas pedagogis dan profesional yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Di balik keberhasilan dari sisi partisipasi, berbagai permasalahan masih menyertai pelaksanaan program ini. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kualitas antar LPTK penyelenggara PPG, yang berdampak pada disparitas mutu pembelajaran dan hasil lulusan (Yusuf et al., 2023). Selain itu, tidak semua peserta memiliki kesiapan yang merata dalam menghadapi kurikulum PPG yang padat dan menuntut, terutama bagi peserta dengan latar belakang pendidikan non-kependidikan atau yang belum memiliki pengalaman praktik mengajar. Tantangan lainnya adalah terkait dengan aspek pembiayaan, terutama bagi peserta jalur mandiri yang harus menanggung beban biaya secara penuh, yang dalam beberapa kasus menjadi hambatan serius terhadap kelanjutan studi mereka (Putra & Sari, 2022). Selain itu, keterbatasan sarana teknologi pendukung, khususnya di LPTK yang berada di luar wilayah perkotaan, juga masih menjadi kendala dalam optimalisasi pembelajaran berbasis digital. Di sisi lain, kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penempatan dan pembinaan lulusan PPG turut menambah kompleksitas permasalahan implementasi program. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi harus dibarengi dengan upaya sistematis dalam menjawab tantangan struktural dan operasional, agar

kualitas lulusan PPG tidak semata kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara substansial.

Dalam konteks tersebut, pentingnya evaluasi yang komprehensif terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru menjadi semakin mendesak. Evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana program ini berhasil menarik minat lulusan sarjana dan mempertahankan komitmen mereka untuk menjadi pendidik profesional. Selain itu, evaluasi yang sistematis mampu mengungkap efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional calon guru, yang menjadi indikator utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan program (Hanun, 2021; Ridwanudin & Takiddin, 2020). Lebih jauh, evaluasi implementasi PPG juga berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data yang dapat memandu perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan di masa mendatang. Melalui evaluasi, penyelenggara dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan, seperti kualitas materi ajar, efektivitas metode pembelajaran, dan relevansi pengalaman praktik mengajar di sekolah mitra. Selain itu, evaluasi juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor eksternal, seperti persepsi masyarakat terhadap profesi guru dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PPG bukan hanya menjadi alat ukur keberhasilan program saat ini, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun sistem pendidikan profesi guru yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.



Gambar 1. 1. Hasil Pemetaan Penelitian PPG dari Tahun 2020-2025

Hasil pemetaan bibliometrik menunjukkan bahwa evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru, khususnya jalur prajabatan, merupakan salah satu fokus utama dalam kajian akademik terkini. Kata kunci “evaluasi” menempati posisi strategis dan terhubung erat dengan istilah penting seperti “ppg”, “program ppg”, “guru”, “pra-jabatan”, dan “pelaksanaan”, yang mengindikasikan bahwa topik ini menjadi simpul utama dalam wacana penelitian. Evaluasi dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi mencakup penilaian menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, kualitas proses pembelajaran, kesiapan calon guru, serta dampaknya terhadap kompetensi profesional. Keterhubungan antara “evaluasi” dengan istilah seperti “input”, “model”, “implementation”, dan “study” menunjukkan bahwa pendekatan evaluatif dilakukan secara sistemik, meliputi aspek masukan, proses, dan keluaran.

Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi program PPG Calon Guru sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan—mulai dari seleksi peserta, kurikulum, praktik lapangan, hingga penilaian akhir—benar-benar mendukung tercapainya tujuan utama, yaitu mencetak guru profesional yang siap mengajar di satuan pendidikan. Selain itu, visualisasi jaringan juga memperlihatkan integrasi kajian lokal dan internasional, serta kecenderungan meningkatnya perhatian terhadap evaluasi

program dalam dua tahun terakhir (2022–2023), yang selaras dengan meningkatnya urgensi perbaikan implementasi PPG di tengah tantangan kebijakan pendidikan dan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, pemetaan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi PPG Calon Guru bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjamin mutu, relevansi, dan keberlanjutan program dalam mendukung transformasi pendidikan nasional.

Evaluasi komprehensif terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru idealnya dilakukan dengan mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan model Kirkpatrick (*Reaction, Learning, Behavior, Results*), guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap efektivitas program dalam menghasilkan guru profesional yang berdaya saing. Evaluasi konteks bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan nyata calon guru di lapangan, relevansi kebijakan pendidikan nasional, serta kondisi sosial dan geografis di masing-masing wilayah implementasi (Hanun, 2021). Sementara itu, evaluasi input menyoroti kesiapan dan kualitas elemen-elemen pendukung program, seperti kompetensi dosen dan guru pamong, sarana dan prasarana pembelajaran, serta keterkaitan kurikulum PPG dengan kompetensi inti yang dibutuhkan oleh guru masa depan (Yusuf et al., 2023).

Pada tahap proses, evaluasi diarahkan pada efektivitas metode pembelajaran, intensitas serta kualitas interaksi akademik antara peserta dengan fasilitator, dan kedalaman refleksi yang muncul selama praktik mengajar di sekolah mitra. Aspek ini penting karena pembentukan kompetensi pedagogis dan profesional tidak dapat dilepaskan dari pengalaman belajar yang kontekstual dan transformatif (Ridwanudin & Takiddin, 2020). Evaluasi produk, ketika dikaji melalui lensa model Kirkpatrick, dapat dibagi menjadi empat level: (1) reaksi, yaitu tingkat kepuasan peserta terhadap proses dan penyelenggaraan program; (2) hasil belajar, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan pedagogis serta profesional calon guru; (3) perubahan perilaku, yaitu kemampuan peserta

menerapkan kompetensinya dalam konteks praktik mengajar; serta (4) hasil akhir, yaitu kontribusi lulusan terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa di sekolah tempat mereka bertugas (Putra & Sari, 2022).

Dengan mengintegrasikan kedua model evaluasi ini, penyelenggara program PPG akan memiliki kerangka evaluatif yang tidak hanya menilai aspek administratif atau output jangka pendek, tetapi juga mencerminkan transformasi pembelajaran yang terjadi, serta dampaknya secara sistemik pada praktik pendidikan nasional. Evaluasi semacam ini juga memungkinkan pengambilan keputusan strategis berbasis data, serta mendorong penguatan tata kelola program yang adaptif dan berkelanjutan (Fadillah & Mulyana, 2021). Oleh karena itu, evaluasi yang menyeluruh bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol mutu, melainkan sebagai landasan ilmiah dalam mengembangkan sistem pendidikan profesi guru yang lebih responsif terhadap dinamika zaman.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, khususnya terkait dengan ketimpangan mutu pelaksanaan, kesiapan peserta, keterbatasan sumber daya, serta perlunya umpan balik berbasis bukti terhadap efektivitas penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru, peneliti memandang perlunya dilakukan evaluasi yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan evaluatif yang memadukan dua model yang saling melengkapi, yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan Kirkpatrick (*Reaction, Learning, Behavior, Results*). Model CIPP dipilih karena mampu menggambarkan proses dan sistem pelaksanaan program secara utuh dari hulu ke hilir, mulai dari kesesuaian kebijakan, kesiapan input, efektivitas proses pembelajaran, hingga hasil akhir yang dihasilkan. Sementara itu, model Kirkpatrick dipertimbangkan sebagai pelengkap karena berfokus pada hasil pembelajaran dari perspektif peserta, termasuk kepuasan, pencapaian kompetensi, perubahan perilaku dalam praktik, serta dampak jangka panjang pada kualitas pembelajaran di sekolah (Ridwanudin & Takiddin, 2020; Hanun, 2021).

Kombinasi kedua model ini diyakini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan integratif terhadap efektivitas program, baik dari sisi pelaksana maupun peserta. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya akan memberikan informasi deskriptif mengenai keberlangsungan program, tetapi juga menawarkan insight strategis bagi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan PPG ke depan. Pendekatan evaluatif gabungan ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis data (*evidence-based recommendations*) yang relevan bagi LPTK, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan peningkatan mutu guru di masa mendatang.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan Program PPG Calon Guru yang mencakup evaluasi konteks, input, proses, dan produk, termasuk kualitas layanan program, transfer kompetensi lulusan, serta dampak program pada level sistem pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluatif yang memadukan dua model yang saling melengkapi, yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan Kirkpatrick (*Reaction, Learning, Behavior, Results*). Untuk mendalami persoalan tersebut secara sistematis, penelitian ini menetapkan sejumlah sub fokus permasalahan yang saling terkait:

1. Kesesuaian pelaksanaan PPG berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, terutama dalam hal sejauh mana kegiatan pelatihan guru ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kajian mengenai kesesuaian dan rasionalitas pelaksanaan PPG Calon Guru terhadap dasar hukum dan kebijakan yang menaunginya, keterhubungan tujuan program dengan arah kebijakan pendidikan nasional, serta relevansinya dengan kebutuhan tenaga guru. Penilaian juga mencakup ketercapaian empat kompetensi utama guru

profesional yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian oleh peserta PPG.

2. Aspek menekankan penilaian atas kecukupan dan kualitas prasyarat penyelenggaraan program yang meliputi kualitas kurikulum, kualifikasi dan kompetensi dosen, guru pamong dan instruktur, dukungan tenaga administrasi, serta ketersediaan fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur pembelajaran. Dimensi ini memusat pada pertanyaan tentang apakah sumber daya yang disediakan telah memadai untuk mendukung pelaksanaan program sesuai standar, sekaligus memungkinkan terciptanya proses pembelajaran profesi yang berkualitas.
3. Analisis mutu implementasi PPG Calon Guru secara terstruktur, terutama pada pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mekanisme bimbingan akademik, dan efektivitas sistem penjaminan mutu internal. Dimensi proses dalam penelitian ini tidak hanya menilai keberlangsungan kegiatan, tetapi juga menilai kualitas pelaksanaannya, konsistensi dengan desain program, serta keteraturan mekanisme pengendalian mutu yang memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. Kualitas LPTK dan Dosen Tenaga Pendidik (DTK) yang terlibat dalam penyelenggaraan PPG juga menjadi sub fokus krusial. Penelitian ini mengkaji tingkat kompetensi akademik dan kemampuan pedagogik para dosen atau instruktur PPG, termasuk pemerataan distribusi tenaga pengajar berkualitas di berbagai daerah. Ketimpangan dalam hal ini dapat berimplikasi pada disparitas kualitas lulusan PPG antarwilayah.
4. Tingkat kepuasan implementasi PPG Calon guru di berbagai wilayah menjadi isu penting yang perlu diidentifikasi. Pada tingkat hasil langsung, fokus diarahkan pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan PPG Calon Guru melalui pengukuran kualitas layanan berbasis instrumen SERVQUAL, sehingga mutu layanan dapat dipahami melalui kesenjangan antara harapan dan persepsi mahasiswa. Pada tingkat hasil terapan, fokus penelitian menilai sejauh mana

pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperoleh selama program tertransfer dan diterapkan dalam situasi kerja nyata sebagai indikator kebermaknaan program. Pada tingkat dampak, fokus penelitian memperhatikan indikasi kontribusi program dalam jangka menengah hingga panjang terhadap tujuan sistemik, termasuk peningkatan kualitas pendidikan nasional, penyerapan tenaga pendidik, mutu lulusan, serta persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas lulusan PPG, sehingga evaluasi tidak berhenti pada keluaran administratif, melainkan menjangkau capaian substantif program dalam kerangka pembangunan pendidikan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus serta sub fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru di Indonesia, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konteks pelaksanaan Program PPG Calon Guru ditinjau dari dasar hukum dan kebijakan, keselarasan tujuan program dengan arah kebijakan pendidikan nasional, dinamika kebutuhan tenaga guru, serta tingkat kesiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara program?
2. Bagaimana kecukupan dan kualitas input pelaksanaan Program PPG Calon Guru, yang mencakup kualitas kurikulum, kualifikasi dan kompetensi dosen, guru pamong dan instruktur, dukungan tenaga administrasi, ketersediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan, serta kesiapan infrastruktur pembelajaran, dan bagaimana bukti empirik mendukung penilaian atas kecukupan input tersebut?
3. Bagaimanakah mutu proses pelaksanaan Program PPG Calon Guru ditinjau secara terstruktur dari aspek pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), efektivitas bimbingan akademik, serta kinerja sistem penjaminan mutu internal, dan

faktor-faktor apa yang menjadi penguat maupun penghambat kualitas proses tersebut?

4. Bagaimanakah pengukuran produk pelaksanaan Program PPG yang ditinjau dari:
 - a. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Program PPG Calon Guru berdasarkan pengukuran menggunakan instrumen SERVQUAL?
 - b. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang telah diperoleh selama program diterapkan dalam konteks kerja nyata setelah mengikuti program PPG Calon Guru di Indonesia?
 - c. Dampak jangka menengah hingga panjang dari program terhadap tujuan sistemik, seperti kualitas pendidikan nasional, penyerapan tenaga pendidik, mutu lulusan, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap lulusan PPG Calon Guru di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian evaluasi ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru di Indonesia berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi konteks pelaksanaan Program PPG Calon Guru dari aspek dasar hukum dan kebijakan, tujuan program dan arah kebijakan pendidikan nasional, kebutuhan tenaga guru, serta kesiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
2. Mengevaluasi input pelaksanaan Program PPG Calon Guru yang meliputi kualitas kurikulum, kualifikasi dan kompetensi dosen, guru pamong dan instruktur, tenaga administrasi, fasilitas laboratorium dan perpustakaan, serta ketersediaan infrastruktur pembelajaran.
3. Mengevaluasi proses pelaksanaan Program PPG Calon Guru secara terstruktur dari aspek pelaksanaan pembelajaran, praktik pengalaman lapangan (PPL), bimbingan akademik, serta efektivitas sistem penjaminan mutu internal.

4. Mengevaluasi produk pelaksanaan Program PPG Calon Guru ditinjau dari:
 - a. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Program PPG Calon Guru menggunakan instrumen SERVQUAL.
 - b. Sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperoleh peserta selama mengikuti Program PPG diterapkan dalam situasi kerja nyata.
 - c. Dampak jangka menengah hingga panjang dari Program PPG terhadap tujuan sistemik, seperti peningkatan kualitas pendidikan nasional, penyerapan tenaga pendidik, mutu lulusan, serta persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas lulusan Program PPG.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang evaluasi pendidikan, khususnya mengenai penerapan model evaluasi yang mengintegrasikan pendekatan *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dan model evaluasi Kirkpatrick. Hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan mengenai evaluasi program pendidikan guru, serta dapat menjadi referensi ilmiah dalam merancang dan melaksanakan evaluasi program sejenis pada masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan: sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk peningkatan mutu Program PPG secara nasional,
- b. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penguatan pelaksanaan Program PPG, baik dari sisi kurikulum, proses pembelajaran, maupun sistem penjaminan mutu internal.

- c. Penyelenggara Program PPG untuk meningkatkan efektivitas program berdasarkan umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Calon guru dan masyarakat pendidikan sebagai sumber informasi mengenai kualitas penyelenggaraan PPG dan dampaknya terhadap kompetensi profesional guru dan mutu pendidikan nasional secara umum.
- e. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang evaluasi program pendidikan, meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pendidikan nasional, serta memperluas wawasan teoretis dan praktis yang berguna dalam kegiatan akademik dan profesional di masa mendatang.

F. State of the Art

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru pada periode 2020–2024 memperlihatkan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu evaluasi implementasi, terutama pada jalur prajabatan. Pemetaan bibliometrik dalam disertasi ini menegaskan bahwa evaluasi PPG Calon Guru merupakan fokus kajian yang menonjol, sekaligus mengindikasikan kebutuhan akan evaluasi yang lebih sistematis untuk menangkap efektivitas program secara utuh dalam kerangka kebijakan, proses pelaksanaan, dan dampaknya. Dalam konteks itu, evaluasi diposisikan bukan semata sebagai mekanisme kontrol mutu, melainkan sebagai landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan berbasis data, perbaikan kebijakan, dan penguatan tata kelola program yang adaptif.

Secara substantif, kajian PPG Calon Guru ditandai oleh pergeseran isu dari sekadar pemenuhan standar administratif menuju pertanyaan yang lebih berorientasi bukti tentang kualitas implementasi lintas wilayah. Disertasi ini menempatkan problematika utama pada disparitas mutu antar LPTK, variasi

kesiapan peserta, serta keterbatasan infrastruktur, termasuk hambatan optimalisasi pembelajaran digital di LPTK nonperkotaan dan lemahnya sinergi penempatan serta pembinaan lulusan antara pemerintah pusat dan daerah. Konstelasi masalah tersebut memperlihatkan bahwa capaian PPG tidak cukup ditakar dari keterlaksanaan program, tetapi perlu diuji melalui keterkaitan antara desain kebijakan, kesiapan sumber daya, mutu proses pembelajaran, serta hasil dan dampak program pada konteks kerja nyata.

Pada titik ini, kebaruan konseptual riset yang dirumuskan dalam disertasi tersebut berangkat dari kritik implisit terhadap evaluasi yang parsial: banyak kajian dapat berhenti pada satu sisi (misalnya proses pelaksanaan atau administrasi), sehingga belum memadai untuk menjelaskan konsistensi rantai sebab-akibat program dari konteks kebijakan hingga dampak. Karena itu, penelitian ini memposisikan integrasi model sebagai kebutuhan metodologis untuk menghasilkan gambaran evaluatif yang holistik, yakni memadukan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dengan Kirkpatrick Four Levels (Reaction, Learning, Behavior, Result) dalam satu kerangka CIPK-4L. Rasionalisasi integrasi ini menegaskan bahwa CIPP kuat untuk membaca program “dari hulu ke hilir” (kebijakan, input, proses, dampak/hasil langsung), sedangkan Kirkpatrick memperdalam dimensi hasil dari perspektif peserta hingga dampak jangka panjang. Dengan demikian, keluaran evaluasi diarahkan tidak hanya deskriptif, tetapi berdaya guna sebagai rekomendasi berbasis bukti bagi LPTK dan pembuat kebijakan.

Kurikulum PPG telah mengakomodasi mata kuliah strategis yang menekankan dimensi pedagogik mutakhir termasuk penguatan pembelajaran

sosial emosional, pembelajaran mendalam, bimbingan konseling bahkan memasukkan materi coding dan kecerdasan buatan sebagai respons terhadap kebutuhan era digital, serta mengadopsi pembelajaran bauran (hybrid learning) yang memadukan tatap muka, daring, pembelajaran mikro, dan praktik lapangan. Konsekuensinya, instrumen evaluasi yang memadai pada tahap mutakhir tidak cukup menilai ketersediaan sarana atau keterlaksanaan perkuliahan, tetapi harus mampu menangkap kualitas pemanfaatan LMS, intensitas pendampingan, praktik reflektif, serta bukti perubahan perilaku mengajar dalam konteks sekolah mitra.

Kontribusi mutakhir penelitian ini terletak pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu: pengembangan dan operasionalisasi model evaluasi yang terintegrasi, serta penguatan basis evidensinya melalui desain mixed methods dan pengembangan instrumen yang mengikuti pendekatan penelitian desain (Plomp) melalui *fase preliminary research, design prototyping, dan assessment*. Langkah ini penting karena mempertemukan kebutuhan evaluasi berskala luas dengan kebutuhan interpretasi dalam membaca kompleksitas implementasi program. Dengan demikian, riset ini menempatkan evaluasi PPG Calon Guru pada ranah evaluasi program yang bukan hanya mengukur ketercapaian, tetapi juga menilai relevansi, efisiensi, serta dampak program secara sistematis dan berbasis bukti, termasuk dimensi penerapan kompetensi dalam kerja nyata dan dampak jangka menengah panjang pada tujuan sistemik seperti kualitas pendidikan dan penyerapan tenaga pendidik.